

## AMBIGUITAS PERAN KYAI DALAM ARENA PUBLIK

Abdullah Achmad Madani

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Email: : [Abduhmadani06@gmail.com](mailto:Abduhmadani06@gmail.com)

### ABSTRAK

*Fenomena perluasan peran Kyai di Pamekasan, Madura, dari fokus tradisional pada keagamaan dan pendidikan pesantren, kini telah merambah ke arena publik dan politik praktis, menciptakan ambiguitas peran yang signifikan. Kyai, yang secara tradisional diyakini sebagai pewaris para nabi dan rujukan utama masyarakat Madura yang fanatic, kini menghadapi dilema internal ketika harus terlibat dalam pragmatisme politik dan bahkan menjadi bagian dari konflik atau alat legalitas kekuasaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa dan bagaimana ambiguitas peran Kyai ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari perluasan peran Kyai sebagai aktor (agen) serta adanya perubahan struktur politik Indonesia pasca-Reformasi 1998. Dengan menggunakan desain penelitian Kualitatif Eksploratif Analisis dengan perspektif pemahaman subjektif, penelitian ini meminjam kerangka Teori Strukturasi Anthony Giddens untuk membedah hubungan dualitas antara aktor Kyai dan struktur politik. Hasil kajian menemukan bahwa ambiguitas peran Kyai dan dilema yang terjadi adalah konsekuensi logis dari perubahan reposisi Kyai yang menuntut kepiawaian dalam mengelola jurang kepentingan (gap) antara peran sakral sebagai tokoh agama dan peran pragmatis sebagai tokoh politik. Penelitian ini menekankan bahwa ambiguitas ini harus dipahami dari perspektif dalam diri Kyai sendiri sebagai aktor publik.*

Keywords: Ambiguitas Peran, Kyai, Arena Publik

### PENDAHULUAN

Pamekasan merupakan daerah karesidenan yang terletak ditengah-tengah pulau Madura dengan masyarakat yang majemuk dan heterogen yang dikenal dengan masyarakat yang fanatic terutama dalam urusan keagamaan. Segala aktivitasnya selalu disandarkan pada nilai-nilai keagamaan dan kepada panutan mereka di dalam masyarakat (Kyai). Karena mereka meyakini bahwa yang berhak dan punya kuasa dalam memutuskan suatu perkara adalah kyai. Kyai<sup>1</sup> merupakan salah satu tokoh dan elit lokal (disamping elit-elit

---

<sup>1</sup> Dalam beberapa versi, dalam penulisannya ada yang menggunakan “Kiai dan Kyai”. Tetapi di dalam tulisan ini, penulis menggunakan versi yang kedua yaitu “Kyai”. Oleh karena itu bahan bacaan yang dalam penulisannya menggunakan “Kiai”, di dalam tulisan ini disesuaikan ke dalam bentuk penulisan “Kyai” sebagai bentuk konsistensi penulisan.

birokrasi yang ada) yang kharismatik<sup>2</sup> dan memiliki tempat yang istimewa, dengan peran dan fungsi bahkan sebagai referensi dan rujukan masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Hal itu dikarenakan kyai diyakini oleh sekelompok masyarakat sebagai orang yang suci (pewaris nabi), yang punya kuasa dan otoritas dalam sosial keagamaan.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, posisi dan peran kyai bergeser dan mulai merambah pada bidang lain, dari yang sebelumnya terfokus pada peran keagamaan dan pendidikan di pesantren, kini mulai tertarik pada dunia diluar, yang menjadikan garapannya semakin meluas. Kyai yang sebelumnya istiqomah membina umat mulai turun gunung masuk ke ruang public dan terlibat dalam dunia politik praktis, kyai yang sebelumnya menjaga jarak dengan pemerintah mulai mendekat bahkan menjadi elit pemerintah, kyai yang sebelumnya menjadi tempat mengadu, penengah konflik dan peredam gejolak masyarakat, kini mulai terlibat bahkan menjadi bagian dari konflik<sup>3</sup>.

Kyai terlibat di dalam politik sejak zaman penjajahan, orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Jadi secara historis keterlibatan kyai dalam politik bukan merupakan hal yang baru dan tidak bisa dipisahkan dengan situasi politik yang menuntut peran aktif kyai, serta terbukanya peluang kearah tersebut<sup>4</sup>, terutama pasca Reformasi 1998. Namun diakui atau tidak, peran multifungsi kyai berada pada posisi yang sulit di dalam masyarakat. Lebih-lebih jika fungsi yang dimainkan tersebut bertentangan dengan fungsi aslinya sebagai tokoh agama dan pembimbing umat. Respon dan perilaku masyarakat pun kepada kyai bisa bergeser, dari emosional ke rasional dan dari ketundukan total menjadi kepatuhan kritis<sup>5</sup>.

Berangkat dari latar belakang inilah penulis akan mengkaji tentang ambiguitas kyai di Pamekasan. Signifikansi dalam penelitian ini adalah perubahan reposisi peran kyai sebagai tokoh agama ke political player tidak hanya disebabkan oleh faktor agen tetapi juga karena

<sup>2</sup> Zamakhsyari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta. LP3ES. Hal 55

<sup>3</sup> Muhammad Kosim *Kyai dan Blater, elit Lokal dalam Masyarakat Madura* Hal 164

<sup>4</sup> Pasang surut peran kyai Madura dalam pentas politik. Subharianto et.al. *Tantangan Industrialisasi Madura*. Hal 88-94 (dalam Muhammad Kosim *Kyai dan Blater, elit Lokal dalam Masyarakat Madura* Hal 164)

<sup>5</sup> Ibid

adanya perubahan struktur politik Indonesia pada tahun 1998. Sehingga reposisi ini menimbulkan ambiguitas yang melahirkan dilemma-dilema dalam diri kyai.

Yang menjadi sorotan di dalam kajian ini adalah dengan berbagai peran kyai tersebut, ketika terjun di dalam arena public dan masuk kedalam dunia politik ditengarai terjadi ambiguitas didalam dirinya dalam memaknai peran kenabian diarena public. Kajian ini bermaksud mengungkap suatu persoalan, mengapa dan bagaimana peran kyai dijangkiti ambiguitas, disatu sisi berada dalam posisi terhormat sebagai pewaris para nabi dan orang yang memiliki kuasa dan kapasitas dalam agama, dan disisi lain tidak jarang terjebak di dalam pragmatisme politik bahkan menjadi alat penguasa Pemerintah sebagai pemberi legalitas dalam setiap kebijakan penguasa? Dengan maksud dari kajian tersebut sehingga diharapkan dapat mengetahui dan mengungkap serta menganalisa perluasan peran kyai di dalam struktur masyarakat terutama pasca reformasi 1998. Selain hal tersebut diharapkan dapat mengetahui pengelolaan ambiguitas yang terjadi yang ada pada diri kyai seiring dengan terjadinya perluasan peran dalam diri kyai.

Prinsip dasar didalam kajian ini adalah memahami fenomena sosial dunia kekyai secara mendalam. Oleh karena itu kajian ini menggunakan perspektif pemahaman subjektif atas fenomena sosial kyai. Maka studi ini menggunakan desain kualitatif. Yaitu merupakan suatu metode yang memerlukan interpretasi peneliti terhadap setiap pokok yang dikajinya serta berupaya memahami dan memberi penafsiran pada fenomena yang dilihat dari makna yang diberikan orang-orang kepada fenomena tersebut<sup>6</sup>.

Kajian dalam Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Kualitatif Eksploratif Analisis dalam rangka menemukan dan membongkar serta menganalisis ambiguitas peran kyai dalam arena publik yang terjadi dikarenakan terjadinya dilemma ketika terjadi reposisi atau perluasan peran kyai sebagai agen, walaupun hal tersebut juga dikarenakan oleh perubahan struktur. Lokasi penelitian ini di Pamekasan Madura, hal ini dikarenakan *pertama* Pamekasan merupakan kabupaten dengan masyarakat yang majemuk dan heterogen. *Kedua* Kyai merupakan elit yang paling berpengaruh dan dominan di Pamekasan. *Ketiga* kehidupan masyarakat yang tidak bisa lepas dari pengaruh kyai.

---

<sup>6</sup> Agus Salim, 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana. Yogyakarta. Hal 34

Ada dua faktor utama yang mendukung posisi kuat seorang kyai. *Pertama* kyai adalah orang yang berpengalaman luas yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaian dan pengetahuannya yang luas tentang keislaman menyebabkan kyai selalu mempunyai pengikut, baik para pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun para santri yang tinggal di pondok di sekitar rumahnya. *Kedua* kyai umumnya berasal dari keluarga berada. Meskipun tidak jarang ditemukan kyai yang miskin pada saat ia mulai mengajarkan islam, seperti ditunjukkan oleh kecilnya ukuran gedung pesantrennya, namun secara umum kyai berasal dari keluarga kaya<sup>7</sup>.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Desain Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Kualitatif Eksploratif Analisis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial dunia kekayaan secara mendalam. Penelitian kualitatif ini memerlukan interpretasi peneliti terhadap setiap pokok yang dikaji serta berupaya memahami dan memberikan penafsiran pada fenomena yang dilihat dari makna yang diberikan oleh orang-orang kepada fenomena tersebut. Desain eksploratif analisis digunakan dalam rangka menemukan, membongkar, serta menganalisis ambiguitas peran Kyai yang terjadi dikarenakan adanya dilema akibat reposisi atau perluasan peran Kyai sebagai agen dalam arena publik.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pamekasan, Madura. Pemilihan lokasi ini didukung oleh beberapa pertimbangan utama: *Pertama*, Pamekasan merupakan kabupaten dengan masyarakat yang majemuk dan heterogen. *Kedua*, Kyai merupakan elit yang paling berpengaruh dan dominan di Pamekasan. *Ketiga*, Kehidupan masyarakat Pamekasan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Kyai. Faktor-faktor ini menjadikan Pamekasan sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji secara mendalam fenomena ambiguitas peran Kyai dalam struktur masyarakatnya.

### Perspektif dan Kerangka Teoritis

Kajian ini menggunakan perspektif pemahaman subjektif atas fenomena sosial Kyai dan menitikberatkan pada peran aktor di dalam sebuah struktur dalam mengelola dilema-

<sup>7</sup> Endang Turmudi,2003, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, LKiS, Yogyakarta. Hal 96

dilema yang muncul. Untuk membedah fenomena ini, penelitian menggunakan pendekatan Teori Strukturalis Anthony Giddens. Teori Strukturalis Giddens relevan untuk menganalisis ambiguitas peran Kyai karena ia melihat hubungan antara agen (Kyai) dan struktur (politik di Indonesia) sebagai hubungan dualitas (timbal balik) yang saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, Teori Strukturalis digunakan untuk membongkar adanya ambiguitas dan dilema yang terjadi dalam diri Kyai seiring dengan perluasan perannya sebagai aktor publik, yang dipandang sebagai konsekuensi logis dari perubahan peran Kyai sebagai agen maupun perubahan struktur politik di Indonesia pasca-Reformasi 1998.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strukturalis dan Agensi ; Suatu Tinjauan Teoritis

Kajian ini hanya menitik beratkan pada peran aktor di dalam sebuah struktur di dalam mengelola dilema-dilema yang muncul. Untuk membedah Penulis akan menggunakan pendekatan sebagaimana yang ditawarkan oleh Anthony Giddens tentang Aktor di dalam sebuah struktur.

Di dalam teori strukturalis ini Giddens berpendapat hubungan agen dan struktur ini merupakan hubungan dualitas (timbal balik) yang terjadi didalam kehidupan sosial. Pelaku (agency) dalam strukturalis adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia<sup>8</sup>. Agency mengacu bukan pada maksud-maksud yang dimiliki orang dalam melakukan sesuatu, melainkan pada kemampuan untuk melakukan sesuatu tersebut sehingga menghasilkan efek<sup>9</sup>. Menjadi agen harus mampu menggunakan gugusan kekuasaan kausal, termasuk mempengaruhi kekuasaan-kekuasaan yang disebarluaskan oleh orang lain. Suatu tindakan tergantung pada kemampuan individu dalam mempengaruhi keadaan atau serangkaian peristiwa yang ada sebelumnya<sup>10</sup>.

Teori Strukturalis Anthony Giddens lebih menitik beratkan pada praktek sosial yang dilakukan oleh individu atau masyarakat yang berlangsung dalam lintas ruang dan waktu<sup>11</sup>. Dalam praktek sosial, Manusia merupakan *actor* (pelaku) dalam hal ini adalah Kyai yang

<sup>8</sup> B.Herry-Priyono. 2002. Anthony Giddens suatu pengantar. Kepustakaan Populer Gramedia.

<sup>9</sup> Anthony Giddens. 2004. *The Constitution of Society* (Terj). Pasuruan. Pedati. Hal 11

<sup>10</sup> Ibid Hal18

<sup>11</sup> Anthony Giddens. 2004. *The Constitution of Society* (Terj). Pasuruan. Pedati.

sudah mengetahui cara berpartisipasi dan mematuhi aturan (*rules*) yang berlaku dalam interaksi yang dijalannya. Hubungan antara kyai sebagai pelaku (agen) dengan praktik sosial (struktur) merupakan hubungan dualitas dan saling melengkapi (hubungan timbal balik) karena praktik sosial merupakan sarana bagi kyai sebagai agen dalam melakukan interaksi diantara kyai (pelaku) yang lain sekaligus praktik sosial merupakan hasil (*outcome*) dari interaksi yang dilakukan setiap pelaku<sup>12</sup>. *Agency* mengacu bukan pada maksud-maksud yang dimiliki orang dalam melakukan sesuatu, melainkan pada kemampuan untuk melakukan sesuatu tersebut sehingga menghasilkan efek<sup>13</sup>

Begitu juga dengan strukturalisme yang menekankan dualisme antara “yang sosial dan yang individual” sebagai perluasan dari hubungan *langue* (mengatasi ruang dan waktu) *parole* (dalam ruang dan waktu). Karena sifat *langue* (mengatasi ruang dan waktu) yang sistemik dan totalitas, maka keunikan pelaku juga lebur dibawah totalitas gejala sosial melalui proses “penyingkiran subjek” (de-centring of the subject). Tindakan individu bersifat kebetulan dan arbitrer karena tidak memiliki referensi dengan realitas<sup>14</sup>.

Dengan kelemahan-kelemahan kedua pendekatan tersebut Anthony Giddens hadir dengan melakukan rekonseptualisasi terhadap aliran pemikiran tersebut diatas. Giddens hadir dengan membangun dasar teori strukturasi yang menitik beratkan penekanan pada pentingnya tindakan pelaku dalam membentuk dan mengembangkan praktik sosial berdasarkan pengelolaan sumber daya (*resource*) dan patuh pada aturan (*rules*). Disamping itu urgensi ruang dan waktu menempati tempat yang sentral dalam teori strukturasi Giddens. Giddens<sup>15</sup> melihat bahwa seluruh proses kehidupan sosial berlangsung dalam lintas ruang dan waktu. Sentralitas ruang dan waktu terjadi karena konteks tersebut merupakan lokus tempat aktivitas pelau dibentuk dan dikembangkan.

Struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas (*duality*), dua sisi koin yang sama. Keduanya berhubungan secara dialektik, dalam artian bahwa, struktur dan agensi saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung secara terus menerus. Struktur sebagai

<sup>12</sup> Bambang Wahyu Hidayat *Konsep Kekuasaan dalam Teori Strukturasi menurut Anthony Giddens* Hal 12

<sup>13</sup> Anthony Giddens. 2004. *The Constitution of Society* (Terj). Pasuruan. Pedati. Hal 11

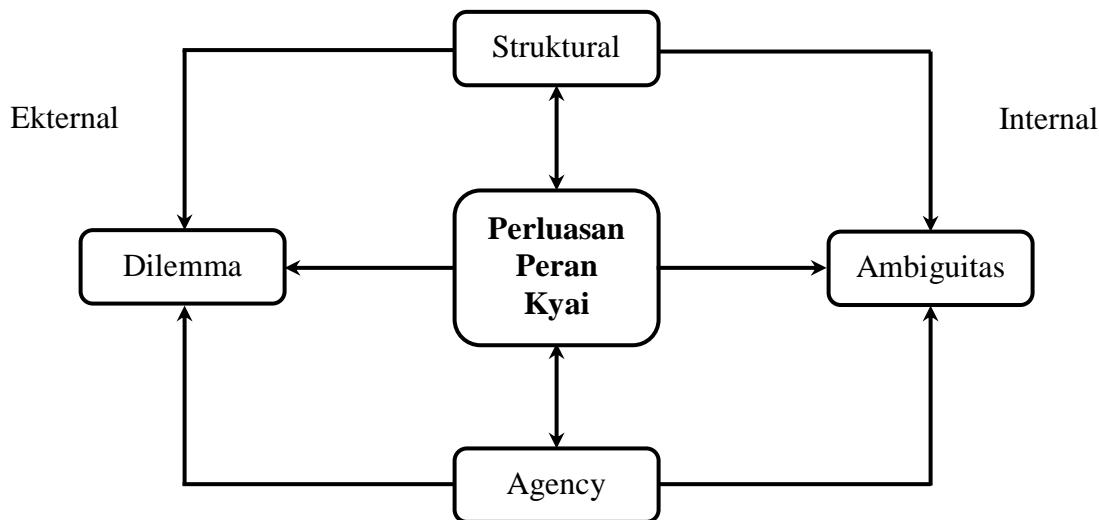
<sup>14</sup> Giddens 1979. *Central Problem in Social Theory*. London. McMillan Press Hal 38 Bambang Wahyu Hidayat Konsep Kekuasaan dalam Teori Strukturasi menurut Anthony Giddens Hal 13.

<sup>15</sup> Anthony Giddens. 2004. *The Constitution of Society* (Terj). Pasuruan. Pedati.

medium dapat mempengaruhi agen dalam dua hal, baik sebagai pembebas (*enabling*) maupun sebagai penghambat atau pengekang (*constraining*). Disisi lain agen juga dapat mempengaruhi struktur, Agensi dapat meninggalkan struktur, dan tidak selalu tunduk kepadanya. Agensi dapat menemukan kesempatan atau kemungkinan keluar dari aturan tertentu yang baku kondisi seperti ini disebut oleh Giddens sebagai *Dialectic of Control* yaitu kemampuan agensi dalam melawan kontrol dari struktur<sup>16</sup>. Hal tersebut bisa dilihat di dalam bagan dibawah ini.

Atas dasar hal tersebut diatas, teori strukturalis Anthony Giddens memiliki relevansi yang erat jika digunakan sebagai alat analisis dalam melihat fenomena ambiguitas peran kyai yang berkembang sebagai konsekuensi logis dari terjadinya perubahan peran kyai sebagai agen maupun perubahan struktur politik di Indonesia. Dalam konteks ini teori strukturalis melihat bahwa serangkaian perubahan-perubahan yang berlangsung dalam perpolitikan di Indonesia melahirkan ambiguitas peran kyai sebagai aktor di dalam arena publik.

### Kerangka Konseptual Strukturalis



### Ambiguitas dan Pemaknaan Peran Kyai ; Diskusi dan Pembahasan

Kyai merupakan elemen yang paling esensial di dalam masyarakat, terutama dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dalam tradisi masyarakat muslim Indonesia kyai ditempatkan

<sup>16</sup> Munafrizal Manan. 2005. *Gerakan Rakyat Melawan Elit*. Yogyakarta. Resist Book. Hal 21

sebagai orang yang istimewa di dalam struktur sosial masyarakat. Pendapat kyai umumnya dijadikan rujukan dan pedoman kehidupan. Dunia kyai akhir-akhir ini menjadi sorotan dan menarik perhatian pengamat baik yang berasal dari Indonesia sendiri maupun dari manca negara. Mereka memberikan fokus dan perhatian khusus pada kehidupan kyai dan menunjukkan bahwa kyai merupakan tokoh yang mempunyai posisi sentral dan strategis terlepas dari adanya perbedaan persepsi dan perbedaan pendapat tentang posisi kyai tersebut.

Kyai merupakan elemen utama di dalam masyarakat lebih-lebih di dalam dunia pesantren. Ia sebagai pendiri, sudah sewajarnya pertumbuhan suatu pesantren bergantung kepada kemampuan pribadi kyai<sup>17</sup>. Demikian juga yang terjadi di Madura, yang dikenal dengan daerah yang sarat pesantren. Peran kyai sangat sentral mencakup semua aspek, baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan (akhirat) maupun dengan masalah keduniaan termasuk sosial dan politik. Kyai merupakan panutan yang kharismatik<sup>18</sup> terutama bagi masyarakat Madura, karena keterikatan kyai yang kuat pada Islam. Serta pengaruh seorang kyai di dalam Masyarakat ditentukan oleh kualitas kekharismaannya<sup>19</sup>. Peran dan fungsi kyai di dalam semua aspek kehidupan menjadi panutan dan tidak jarang juga menjadi sorotan, terutama ketika seorang kyai sudah mulai merambah dalam dunia politik, baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan maupun dengan masalah-masalah lain seperti sosial, budaya dan politik. Oleh karena itu kajian ini akan mengkaji ambiguitas peran dan fungsi kyai di dalam arena Publik.

Clifford Geertz<sup>20</sup>, mengkaji tentang bagaimana seorang kyai memainkan perannya di dalam struktur kemasyarakatan yaitu sebagai pialang budaya (*cultural broker*). Peran tersebut hanya dalam urusan keagamaan namun begitu juga dalam urusan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Ia memandang kyai berperan sebagai alat penyaring atas arus informasi dan globalisasi yang masuk di lingkungan kaum santri, menularkan apa yang

---

<sup>17</sup>Zamakhshyari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren studi tentang pandangan hidup Kyai*. Jakarta. LP3ES Hal 55

<sup>18</sup>Horikoshi. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta. P3M. Hal 211

<sup>19</sup>Ibid Hal 212

<sup>20</sup>Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (terj. Aswab Mahasin), Pustaka Jaya, Jakarta:

dianggap bermanfaat bagi masyarakat dan membuang apa yang dianggap merusak masyarakat. Dalam artian bahwa kyai berperan membendung dampak negatif dan arus budaya luar yang masuk kedalam kehidupan masyarakat.

Horikoshi<sup>21</sup> di Jawa Barat ia melihat peranan kyai kreatif dalam proses perubahan sosial. Posisi kyai yang ditempatkan sebagai posisi penghubung atau kreatif yang mampu masuk dalam permainan kekuasaan yang begitu rumit dengan sistem luar yang dominan. Dalam hal ini kyai berperan sebagai jembatan dan penengah (*intermediary*). Peran kyai sebagai wakil masyarakat dalam hubungannya dengan sistem nasional adalah merupakan hal yang terpenting. Masyarakat telah mengabsahkan kyai sebagai pemimpin dan juru bicara mereka<sup>22</sup>.

Sidik Jatmika<sup>23</sup> ia membahas tentang Reposisi Kyai dan Cultural broker ke *Elective political Leader* atau *Political player* yang determinan dalam proses formulasi dan eksekusi keputusan politik, padahal pada masa orde baru telah terpinggirkan. reposisi ini dinilai sebagai bentuk perluasan dari kedudukan sebelumnya. Di era Orde Baru, posisi kyai terpinggirkan dan tidak determinan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Namun pasca Orde Baru, kyai tidak lagi sekedar penarik suara (*vote-getter*) tetapi sekaligus menjadi pemimpin politik (*elective-political leader*) atau pemain politik (*political player*) yang memiliki posisi tawar (*bergaining position*) yang kuat dan menentukan dalam proses politik<sup>24</sup>. Namun menurutnya kyai tidak menggunakan agama untuk tujuan politik akan tetapi sebaliknya, mereka justru menggunakan politik untuk mencapai tujuan Islam.

Zamakhsyari Dhofier<sup>25</sup> dalam penelitiannya tentang *tradisi pesantren* menunjukkan bahwa dunia pesantren merupakan wadah yang memiliki kemampuan untuk berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dan perubahan di dalam pesantren tidak lepas dari peran seorang kyai. Kyai merupakan pimpinan dan pengajar yang memiliki kedudukan yang tinggi didalam masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan

<sup>21</sup> Horikoshi, 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta

<sup>22</sup> Ibid Hal 234

<sup>23</sup> Sidik Jatmika Disertasi "Kyai dan politik lokal" Studi Kasus Reposisi Politik Kyai NU Kebumen, Jawa Tengah

<sup>24</sup> Ibid Hal 1

<sup>25</sup> Zamakhsyari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren studi tentang pandangan hidup Kyai*. Jakarta. LP3ES Hal 55

penganjur (*preacher*) dengan baik maka perlu memahami kehidupan politik. Mereka dianggap dan menganggap diri memiliki suatu posisi atau kedudukan yang menonjol baik pada tingkat lokal maupun nasional. Mereka merupakan pembuat keputusan dalam kehidupan sosial orang jawa, tidak hanya dalam kehidupan keagamaan tetapi juga dalam soal-soal politik<sup>26</sup>. Mereka berpedoman bahwa Karena hukum islam mengatur, tidak hanya antara hubungan individu dengan tuhan, tetapi juga hampir semua hubungan sosial dan personal (politik). Sejak Indonesia merdeka banyak diantara kyai yang diangkat menjadi menteri, anggota parlemen, duta besar, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan<sup>27</sup>.

Endang Turmudi<sup>28</sup> dalam kajiannya tentang *perselingkuhan kyai dan kekuasaan*, yang mengambil lokasi dijombang dengan fokus kajiannya terhadap hubungan kyai dengan perubahan sosial politik yang lebih luas yaitu perubahan kepemimpinan kyai. Di Dalam penelitiannya Endang turmudi menjelaskan tentang tipologi kyai yang didasarkan pada realitas peranan kyai di dalam masyarakat dan relasinya dalam kehidupan secara luas, termasuk dalam relasi dengan politik. Tipologi tersebut adalah kyai pesantren, kyai tarekat dan kyai yang terlibat di dalam politik. Dengan menyoroti dua aspek kepemimpinan kyai *Pertama*, keterikatan kyai yang kuat pada Islam menyebabkan kepemimpinannya dipandang sebagai kharismatik. *Kedua*, independensi masing-masing kiai yang sekaligus menunjukkan bahwa umat Islam Jombang secara sosial terpecah-pecah sesuai dengan jalur kesetiaannya pada berbagai kyai lokal. Ia menunjukkan otoritas kekharismatikan kyai yang digunakan melalui kepemimpinan kyai mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam legitimasinya. Ada batas-batas yang menentukan wilayah lingkungan bagi ekspresi legitimasinya yang menjadikan pengikutnya terpecah-pecah. Para pengikut punya dasar dan alasan untuk menentang legitimasi pernyataan atau keputusan kyai, khususnya dalam isu-isu sosial-politik. Misalnya, dorongan kyai untuk mendukung suatu partai selain partai Islam mendatangkan respon-respon negatif dari para pengikut. Beberapa kiai bahkan ditinggalkan oleh sejumlah besar pengikut karena sikap politik mereka.

---

<sup>26</sup> Ibid 56

<sup>27</sup> Ibid hal 57

<sup>28</sup> Endang Turmudi,2003, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, LKiS, Yogyakarta

Sunyoto Usman<sup>29</sup>, menjelaskan tentang peran Kyai dalam perpolitikan semakin terpinggirkan dalam penelitiannya di Jombang dan di Kudus dengan mengungkapkan bahwa peran kyai dalam hal politik semakin terpinggirkan dan tidak seperti zaman dulu, namun masih ada kyai yang sangat diperhatikan dalam proses formulasi dan eksekusi keputusan politik, tetapi secara umum peranan mereka semakin terpinggirkan. Di dalam penelitiannya ia menunjukkan bahwa kebanyakan para pemimpin agama yang diteliti ternyata kurang populer di desa –desa mereka dibanding dengan elit-elit desa yang lain, seperti kepala desa atau orang-orang kaya. Para pemimpin agama tidak terlalu banyak terlibat dalam proyek-proyek pemerintah lokal untuk meningkatkan standar kesejahteraan penduduk. Studi ini menunjukkan bahwa kyai mempunyai jaringan kerja yang lebih kecil, baik di kalangan mereka sendiri maupun dalam hubungan dengan elit-elit desa yang lain. Dalam banyak kasus menurut Usman, penduduk tidak lagi menemui para pemimpin keagamaan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan dunia mereka dan lebih suka mendatangi para pegawai birokrasi di tingkat desa. Meskipun focus Usman lebih umum dan berada diluar bidang tempat kyai terlibat secara tradisional dan cultural, namun temuannya menunjukkan bahwa proses pembangunan yang tidak terelakkan, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam situasi dan pandangan sosio-politik umat islam<sup>30</sup>.

Patut diakui, terdapat beberapa kajian empirik terhadap fenomena sosial kyai yang semuanya dilakukan terhadap kyai dengan berbagai aspek yang melekat di dalamnya. Dari penelitian yang sudah ada, tidak tampak kajian yang melakukan analis terhadap fenomena multi fungsi peran kyai dalam masyarakat yang menyebabkan ambiguitas didalam diri kyai. Apalagi jika fungsi tersebut bertentangan dengan fungsi aslinya sebagai tokoh agama dan pembimbing umat.

Masyarakat Madura dikenal dengan masyarakat yang fanatic terutama dalam urusan keagamaan segala aspek aktivitasnya selalu disandarkan pada nilai-nilai keagamaan dan

---

<sup>29</sup> Sunyoto Usman, 1988, *Interaksi antar elit lokal dalam implementasi pembangunan* , Pusat Penelitian UGM, Yogyakarta.

<sup>30</sup> Muhibbin, 2012 *Politik Kyai dan Politik Rakyat Pembacaan Masyarakat terhadap Perilaku Politik Kyai*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 15

kepada panutan mereka di dalam masyarakat (kyai) karena mereka meyakini bahwa yang berhak dan punya kuasa dalam memutuskan suatu perkara keagamaan adalah kyai.

Dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia khususnya di Madura dalam hal ini Pamekasan. Kyai<sup>31</sup> merupakan salah satu tokoh, dan elit lokal (di samping elit-elit birokrasi yang ada) yang Kharismatik<sup>32</sup> dan memiliki tempat yang istimewa, dengan peran dan fungsi, bahkan sebagai referensi dan rujukan masyarakat, tidak hanya dalam urusan keagamaan bahkan semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat, seperti perkawinan, kelahiran anak, kesuksesan, perdagangan dan lain sebagainya. Hal itu dikarenakan kyai diyakini oleh sekelompok masyarakat sebagai orang yang suci (pewaris nabi), yang punya kuasa dan otoritas dalam sosial keagamaan. Di sisi lain masyarakat (Madura) dikenal fanatik dalam urusan keagamaan dengan menjadikan kyai sebagai panutan mereka, sehingga Kuntowijoyo menyebutnya Madura adalah “Pulau Seribu Pesantren”<sup>33</sup>, dengan bermacam-macam Kyai mulai tingkat kampung sampai tingkat kabupaten. Semuanya mempunyai pengaruh yang besar dan dalam masyarakat tergantung pada asal-usul keturunan, kedalaman ilmu agama yang dicapai, kepribadian, kesetian menyantuni umat dan yang lainnya<sup>34</sup>.

Kalau ditelusuri lebih jauh, salah satu faktor yang membentuk kebesaran pengaruh kyai adalah faktor teologis, karena dikalangan masyarakat muslim, kyai dipandang sebagai pewaris para Nabi. Fungsi kyai sebagai pengganti para nabi sebetulnya berasal dari struktur hierarkis kewenangan individu dalam penafsiran kitab suci<sup>35</sup>. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, kreteria *ortopraksi* (kesalihan seorang kyai) ini kemudian bergeser tidak seperti kyai tradisional yang hanya terus menerus mengabdikan dirinya pada

<sup>31</sup> Dalam beberapa versi, dalam penulisannya ada yang menggunakan “Kiai dan Kyai”. Tetapi dalam tulisan ini, penulis menggunakan versi yang kedua yaitu “Kyai”. Oleh karena itu bahan bacaan yang dalam penulisannya menggunakan penulisan “Kiai”, di dalam tulisan ini disesuaikan ke dalam bentuk penulisan “Kyai” sebagai bentuk konsistensi penulisan.

<sup>32</sup> Zamakhshari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren studi tentang pandangan hidup Kyai*. Jakarta. LP3ES Hal 55

<sup>33</sup> Muthmainnah. 1998. *Jembatan Suramadu; Respon Ulama terhadap Industrialisasi*. Yogyakarta. LKPSM. Hal xi.

<sup>34</sup> Jurnal Mohammad Kosim *Kyai dan Blater* (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura) Hal 162

<sup>35</sup> Muhibbin 2012. *Politik Kiai dan Politik Rakyat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal xi

kegiatan pengajaran<sup>36</sup>. Belakangan berkembang fenomena reposisi peran kyai mengalami perubahan dimana sebelumnya hanya sebagai tokoh agama menjadi *political player* bahkan pemimpin politik dan pemerintahan di suatu daerah. Kiprah kyai dalam dunia politik sudah tidak terbantahkan lagi, hal tersebut didukung dengan fakta-fakta dan realita tentang banyaknya kyai yang terlibat dalam politik praktis, baik terlibat secara langsung maupun memberikan dukungan pada calon-calon tertentu<sup>37</sup>. Terbukti dengan organisasi NU yang merupakan simbol organisasi dan partai umat islam mulai memasuki politik formal sebagai unsur dari partai Islam Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 1945 meskipun pada Tahun 1952 NU memutuskan keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik mandiri<sup>38</sup>.

Pada Pemilu 1971, NU meraih suara dukungan 18,7 % sekaligus menduduki urutan nomor 2 setelah Golongan Karya (Golkar). Sejak itu kalangan Nahdliyin menjadi sasaran berbagai restriksi dan intimidasi penguasa Orde Baru. Pada tahun 1973 NU dipaksa untuk berfusi dengan tiga partai Islam lainnya untuk membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat itu hampir semua kyai mantan pendukung partai NU kemudian mengalihkan dukungannya ke PPP. Hingga tahun 1984 NU menjadi sumber oposisi utama terhadap pemerintah.<sup>39</sup>

Upaya depolitisasi yang dilakukan pemerintah menjadikan kyai semakin terpinggirkan posisinya dalam perpolitikan meskipun sebelumnya Sejak tahun 1950, hanya ada satu Menteri Agama yang bukan berasal dari kalangan kyai (NU) yaitu Fakih Usman, dalam Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953)<sup>40</sup> menurut Andree Feilard<sup>41</sup>

Setelah Pemilu 1971, pemerintah semakin memperkuat posisinya terhadap partai-partai yang tidak lagi memiliki wakil di kabinet. NU kehilangan Departemen Agama yang sejak kemerdekaan hampir selalu dipercayakan kepadanya dan sejak tahun 1963 menjadi Departemen terbesar keempat di Indonesia. Jadi, keputusan

<sup>36</sup> Ibid Hal X

<sup>37</sup> Zainal Arifin Toha *Runtuhnya singgasana Kyai NU, Pesantren dan Kekuasaan : Pencarian tak Kunjung Usang*. Yogyakarta. Kutub 2003. Hal 177-178

<sup>38</sup> Sidik Jatmika Disertasi "*Kyai dan politik lokal*" Studi Kasus Reposisi Politik Kyai NU Kebumen, Jawa Tengah Hal 3

<sup>39</sup> Greg Fealy & Greg Barton, 1997, *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, LKiS, Yogyakarta (dalam Sidik Jatmika hal 3)

<sup>40</sup> Op. Cit Hal 4

<sup>41</sup> Feilard,1999, *NU vis-à-vis Negara*, LKiS, Yogyakarta, hal.160.

yang diambil pemerintah bukanlah karena pengelolaan departemen tersebut yang kurang baik, melainkan lebih disebabkan oleh keinginan untuk menghapus kekuasaan NU yang menyerupai kekuasaan negara dalam negara.

Sunyoto Usman<sup>42</sup> mempertegas fakta kian terpinggirnya kyai dalam politik dengan pernyataan :

Studi-studi yang penulis lakukan di Jombang (1990) dan di Kudus (1994) memperlihatkan kecenderungan bahwa peranan kiai dalam masalah-masalah sosial politik semakin bergeser ke pinggiran. Peranan mereka tidak sehebat dulu.

Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa di era Orde Baru, kyai terpinggirkan posisinya dan tidak determinan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Reformasi tahun 1998 pasca runtuhnya rezim pemerintahan otoriter Soeharto sebagai titik awal era transisi demokrasi Indonesia. Hal ini telah membawa dampak yang begitu besar dalam struktur politik Indonesia baik dalam struktur kelembagaan maupun dalam struktur kemasyarakatan. Dengan terbukanya kran demokrasi, reposisi kyai mengalami perubahan dimana sebelumnya hanya sebagai tokoh agama menjadi *political player* bahkan pemimpin politik dan pemerintahan di suatu daerah. Kyai tidak lagi sekedar penarik suara (*vote-getter*) tetapi sekaligus menjadi pemimpin politik (*elective-political leader*) atau pemain politik (*political player*) yang memiliki posisi tawar (*bargaining-position*) kuat dan menentukan dalam proses politik. Pasca tumbangnya rezim otoriter Orde Baru, beberapa Kyai terpilih menjadi pemimpin politik (*elective-executive political leader*) atau pemain politik (*political player*) yang memiliki posisi tawar yang kuat dalam proses politik. Hal itu antara lain tercermin pada posisi Kyai sebagai presiden, bupati ataupun wakil bupati<sup>43</sup>. Meskipun pada masa Orde Baru reposisi ini sudah terjadi tetapi reposisi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor kyai sebagai agen tetapi juga adanya perubahan struktur 1998 melahirkan reposisi kyai dalam politik semakin kuat.

Dengan demikian perubahan dan pergeseran reposisi kyai, baik terjadi karena faktor kyai sebagai agen maupun karena adanya perubahan struktur politik melahirkan ambiguitas dalam individu kyai dalam memerankan dualisme kepemimpinannya di dalam kehidupan

<sup>42</sup> Usman, 1998, "Pemuda, Ulama dan Pemilu", dalam *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 215 dan 64 (dalam Sidik Jatmika Hal 5)

<sup>43</sup> Sidik Jatmika Disertasi "*Kyai dan politik lokal*" Studi Kasus Reposisi Politik Kyai NU Kebumen, Jawa Tengah

sosial politik masyarakat. Ambiguitas tersebut terjadi dikarenakan oleh adanya gab-gab kepentingan dalam individu kyai baik sebagai tokoh agama maupun tokoh politik. Sehingga memunculkan dilema yang dihadapi oleh kyai dan menuntut kepiawaianya dalam mengelola dilema-dilema yang terjadi dalam dirinya.

## Kesimpulan

Dengan beberapa kajian yang meneliti tentang kyai yang sudah dilakukan, kajian tentang Ambiguitas peran kyai dalam arena publik menjadi menarik karena selama ini kajian tentang kyai menggunakan pendekatan struktural sebagai teori makro seperti dalam penelitiannya Sidik Jatmika<sup>44</sup> yang dalam disertasinya tentang *Kyai dan Politik Lokal studi Kasus dalam Reposisi Politik Kyai NU di Kebumen Jawa Tengah*, penelitiannya Sunyoto Usman<sup>45</sup>, yang meneliti di Jombang dan di Kudus tentang peran Kyai dalam perpolitikan semakin terpinggirkan serta penelitiannya Endang Turmudi tentang *Perselingkuhan kyai dan kekuasaan*. Maupun menggunakan pendekatan aktor sebagai teori mikro seperti dalam kajiannya Geertz<sup>46</sup>, tentang kyai sebagai Cultural broker serta dalam penelitiannya Horikoshi<sup>47</sup> di Jawa Barat ia melihat peranan kyai kreatif dalam proses perubahan sosial. Ambiguitas kyai terjadi dikarenakan oleh adanya dominasi struktur politik yang tidak mengenal kompromi sehingga melahirkan dilema-dilema yang menuntut kepiawaian, kelihaihan serta keahlian kyai dalam memerankan dirinya sebagai tokoh agama dan tokoh politik. Kajian dalam penelitian ini menggunakan perspektif dari dalam individu kyai. Sebab penelitian yang ada memandang kyai dengan menggunakan perspektif dari luar individu kyai. Dengan meminjam Teori Strukturasi Anthony Giddens untuk membongkar adanya ambiguitas didalam individu kyai serta terjadinya dilema-dilema yang dalam individu kyai sebagai tokoh publik. Reposisi aktor (kyai) terjadi disebabkan oleh terjadinya perubahan aktor sebagai agen dan disebabkan karena adanya perubahan dalam struktur politik

<sup>44</sup> Sidik Jatmika Disertasi "Kyai dan politik lokal" Studi Kasus Reposisi Politik Kyai NU Kebumen, Jawa Tengah

<sup>45</sup> Sunyoto Usman, 1994, *Politik , Taqlid dan Interaksi Guru Murid Dalam Tarekat*, Laporan Penelitian UGM, Yogyakarta.

<sup>46</sup> Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (terj. Aswab Mahasin), Pustaka Jaya, Jakarta:

<sup>47</sup> Horikoshi, 1987, *Kiai dan Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta

### **Daftar Pustaka**

- Anthony Giddens. 2004. *The Constitution of Society* (Terj). Pasuruan. Pedati.
- B.Herry-Priyono. 2002. Anthony Giddens suatu pengantar. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (terj. Aswab Mahasin), Pustaka Jaya, Jakarta
- Horikoshi, 1987, *Kiai dan Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta
- Muhammad Kosim *Kyai dan Blater, elit Lokal dalam Masyarakat Madura*
- Munafrizal Manan. 2005. *Gerakan Rakyat Melawan Elit*. Yogyakarta. Resist Book.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Subharianto et.al. *Tantangan Industrialisasi Madura*. Hal 88-94
- Sidik Jatmika Disertasi "Kyai dan politik lokal" Studi Kasus Reposisi Politik Kyai NU Kebumen, Jawa Tengah
- Zamakhshyari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta. LP3ES.